

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Temuan penelitian “Problematika Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2024” menghasilkan kesimpulan bahwa sistem sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan, dengan acuan dan peraturan dan petunjuk pelaksanaannya. Meskipun memiliki kendala dan problem-problem yang ada, tapi tidak memungkiri di lakukannya sistem zonasi pada saat Penerimaan Pesera didik Baru. Kesimpulan ini didapat dengan menggunakan teori Implementasi George C. Edwards III dan mengukurnya melalui empat indikator sebagai berikut.

1. Komunikasi

Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cibinong telah melakukan sosialisasi dan komunikasi masyarakat sebagai bagian dari aspek komunikasi pengenalan kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2024. SMP Negeri 1 Cibinong sudah melakukan sosialisasi baik secara luring maupun daring. Ditemukan bahwa pihak sekolah memberikan informasi yang konsisten melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial chatting dan pengumuman resmi, hal ini terbukti dapat membantu orangtua dan calon siswa untuk memahami aturan zonasi dan mencegah keluhan terkait ketidakjelasan proses pendaftaran. Dan menurut peneliti komunikasi paling efektif dilakukan yaitu melalui saluran sosial media dan whatsApp karena melalui online digital informasi dapat diterima langsung secara *real time*.

2. Sumber Daya

Untuk melayani masyarakat, SMP Negeri 1 Cibinong dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, seperti petugas pendaftaran dan tenaga pendukung di sekolah. Pihak sekolah juga memberikan infrastruktur pendukung PPDB, seperti pengadaan teknologi (Laptop,tab), jaringan internet, penyediaan fasilitas pendaftaran,

yang memberikan kemudahan calon siswa dalam pelaksanaan sistem zonasi ini.

3. Disposisi

Terkait dengan dimensi disposisi ini, seberapa siapkah pelaksana penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2024 ? Selain itu juga berkaitan dengan pola pikir pihak sekolah yang melakukan pelaksanaan sistem zonasi tersebut. Dalam hal ini mengamanatkan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan adil dalam penerimaan siswa. Kepala sekolah dan staf pendidikan menunjukkan kesiapan untuk menerima siswa berdasarkan zona yang telah ditetapkan, meskipun ada tantangan dalam penyesuaian kuota dan kapasitas fasilitas. Dalam menghadapi protes atau ketidakpuasan, pihak sekolah tetap berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, menunjukan secara langsung dalam proses atau menentukan dalam penerimaan peserta didik baru.

4. Struktur Birokrasi

SMP Negeri 1 Cibinong menerapkan pelaksanaan sistem sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada aspek struktur birokrasinya. Dalam struktur birokrasi ini kita bisa melihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP yang bisa mendukung pelaksanaan PPDB secara transparan dan adil. Ditemukan adanya koordinasi antara dinas pendidikan kabupaten bogor dengan sekolah menengah pertama dikabupaten bogor dalam persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB). Dan mengacu pada SOP, Pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 1 Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2024 menunjukkan bahwa prosedur administrasi yang ada sudah cukup terstruktur, mulai dari tahap pendaftaran, verifikasi data, hingga pengumuman hasil seleksi. Hal ini mempermudah petugas dan masyarakat dalam mengikuti alur pendaftaran yang telah ditentukan. Pihak sekolahpun mendukung penanganan masalah atau keluhan masyarakat dengan menyediakan jalur komunikasi dan prosedur yang jelas bagi masyarakat yang ingin mengajukan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dimensi yang **paling unggul** adalah

Komunikasi. Hal ini karena pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi yang efektif melalui berbagai saluran komunikasi, baik luring maupun daring. Selain itu, mereka memberikan informasi yang konsisten, yang terbukti membantu orangtua dan calon siswa memahami kebijakan zonasi dan mengurangi keluhan terkait ketidakjelasan.

Sedangkan dimensi yang **kurang** terletak pada **Disposisi**. Meskipun kepala sekolah dan staf pendidikan menunjukkan kesiapan untuk melaksanakan kebijakan zonasi dan berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, ada tantangan dalam penyesuaian kuota dan kapasitas fasilitas. Hal ini bisa menciptakan ketidakpuasan yang lebih besar jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, meskipun protes masyarakat dihadapi dengan komunikasi yang baik, namun penerimaan siswa berdasarkan kuota dan kapasitas menjadi tantangan dalam proses pelaksanaan sistem zonasi.

5.2 Saran

Berikut rekomendasi pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang peneliti lakukan berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari temuan penelitian yang telah dilakukan.

5.2.1 Saran Teoritis

1. Disarankan bagi para peneliti selanjutnya untuk meninjau kembali sumber dan referensi yang digunakan dalam penelitian mereka, khususnya terkait dengan adopsi sistem zonasi oleh Sekolah Menengah Pertama Di Cibinong.
2. Kajian selanjutnya mengenai penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat sekolah menengah pertama di Cibinong Kabupaten Bogor hendaknya lebih detail dan fokus.
3. Penerapan sistem sistem zonasi dalam PPDB yang dilakukan SMP Negeri 1 Cibinong merupakan subjek eksklusif dari temuan penelitian ini. Oleh karena itu, disarankan bagi para akademisi masa depan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem zonasi dalam PPDB di SMP Negeri 1 Cibinong Kabupaten Bogor.

5.2.2 Saran Praktis

1. Mampu memusatkan hasil penerapan sistem zonasi PPDB guna memudahkan masyarakat umum dalam memperoleh informasi yang efektif dan efisien terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). SMP Negeri 1 Cibinong Kabupaten Bogor menjadi penyelenggara kebijakan tersebut.
2. SMP Negeri 1 Cibinong disarankan untuk meningkatkan dan mempertahankan konsistensi dalam mengkomunikasikan informasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Seperti, bekerja sama dengan Media local atau platform digital untuk menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan tentang kebijakan zonasi.

